



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA
BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERI ISTU HARIONO, S.Si

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI PAPUA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

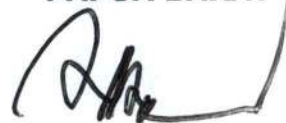
**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022

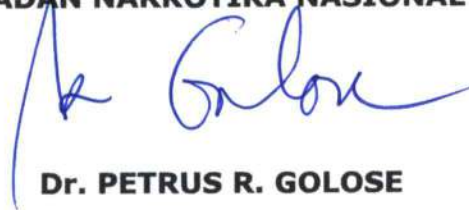
Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
PAPUA BARAT**


HERI ISTU HARIONO, S.Si

14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.2.546.860.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp.45.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
PAPUA BARAT



HERI ISTU HARIONO, S.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA
BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	1 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	7 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.90.500.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.120.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.267.500.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Rp.130.000.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.290.210.000 |
| 6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.158.459.000 |
| 7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp.61.000.000 |
| 8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | Rp.75.000.000 |
| 9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.525.438.000 |
| 10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp.173.775.000 |
| 11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.1.268.928.000 |
| 12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.52.862.000 |
| 13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.61.756.000 |